KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Siska Lis Sulistiani

Universitas Islam Bandung

Email: siska.sulistiani@unisba.ac.id

DOI: 10.37876/adhki.v2i2.38

Abstract

This study aims to analyze differences in the legal position and classification of children outside of marriage according to Islamic law and positive law in Indonesia. The presence of children in a family is a gift from Allah Ta'ala that must be guarded. However, not a few of the problems that occur are related to the legality of the marriage which has legal consequences on the legal status of the resulting child. From 2 different legal points of view, namely Islamic law and positive law in Indonesia regarding children outside of marriage, and who is included in outside marriage and what the legal consequences are. This study uses a normative juridical research method using primary legal sources in the form of Law No.1 of 1974, KUHPDT, Jurisprudence, Al-Qur'an and Al-Hadith, secondary sources of law such as journals, books, theses, and related dissertations, collected by method of literature study and analyzed through descriptive analysis. The results of this study indicate that there is a difference in the classification of children outside of wedlock according to positive law and Islamic law, because there are different perspectives, especially with regard to children resulting from sirri marriages which according to positive law are in the category of children outside of marriage, as a result of unlawful marriages in the eyes of the law country.

Keywords: Children, out of wedlock, law, Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kedudukan hukum dan klasifikasi dari anak luar kawin menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah dari Allah Ta'ala yang harus dijaga. Akan tetapi, tidak sedikit dari masalah yang terjadi terkait keabsahan perkawinan yang berakibat hukum pada status hukum anak yang dihasilkan. Dari 2 sudut pandang hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait anak luar kawin, dan siapa saja yang termasuk anak luar kawin dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum primer berupa UU No.1 Tahun 1974, KUHPDT, Yurisprudensi, Al-Qur'an dan Al-Hadis, sumber hukum sekunder seperti jurnal, buku, tesis, disertasi yang berkaitan, dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan dianalisis melalui deskripsi analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan klasifikasi anak luar kawin menurut hukum positif dan hukum Islam, karena berbeda cara pandang khususnya terkait anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri yang menurut hukum positif dalam kategori anak luar kawin, sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah di mata hukum negara.

Kata kunci: Anak, luar kawin, hukum, Islam.

Pendahuluan

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai manusia,

membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan, dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab¹.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa orang tuanya². Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS.Ar-Rum [30] :21).

Pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 281 KUHPerdata dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil³.

Dari Pasal 43 UU Perkawinan Tahun 1974, kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian UU pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final⁴ melalui putusannya bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”⁵.

Dalam hukum positif seorang anak luar kawin juga harus mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya, seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya.⁶ Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak terhadap anak luar kawin. Putusan MK

¹ Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Airlangga University Press, 1986. hlm. 28 – 29.

² Siska Lis Sulistiani. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2015. hlm.v.

³ Eddo Febriansyah. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Nikah yang diakui dalam pembagian Waris*. Jurnal Hukum Unnes Vol.4 No.1 Tahun 2015. Hlm. 9 .

⁴ Efik Yusdiansyah. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2010.hlm.75.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010.

⁶ Ibid, hlm.129.

tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi di sisi lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan⁷.

Dengan adanya terobosan hukum ini memberikan kesempatan kepada setiap anak luar kawin tanpa terkecuali untuk mengakses apa yang menjadi hak keperdataannya sebagai warga negara, baik jalur pembuktian di persidangan atau serangkaian pembuktian lainnya seperti melalui tes DNA atau yang lainnya. Hal tersebut, mengingat tidak berdosanya seorang anak yang lahir sehingga pada dasarnya tidak ada alasan bagi negara dalam hal ini menjegal apa yang menjadi haknya sebagai warga negara. Namun, di sisi lain tidak dapat dihindari berbagai polemik muncul dengan adanya putusan tersebut karena dalam pandangan norma dan hukum Islam khususnya untuk anak zina tidak dapat disamakan dengan anak luar kawin lainnya, hanya saja dalam putusan ini MK tidak menjelaskan pengkategorian anak luar kawin yang mana saja yang dimaksud, sehingga memunculkan pemahaman bahwa hal tersebut berlaku untuk semua anak luar kawin dalam kacamata hukum positif⁸.

Kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia yang bukan hanya sebagai *persuasive source* (sumber persuasif) namun telah menjadi *authoritative source* (sumber otoritatif) yaitu sumber yang memiliki kekuatan (*authority*)⁹.

Menurut Sayuti Thalib dengan teori *receptie a contrario* bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam¹⁰. Sebagai antitesis dari teori *receptie* serta kelanjutan dari teori *receptie exit*¹¹, kemudian lahir teori eksistensi setelah teori *receptie a contrario*. Teori eksistensi menurut Ichtiarto adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia¹².

Pengakuan dalam putusan MK¹³ yang bersifat final menjadi dua kemungkinan yaitu; pengakuan secara suka rela yang dilakukan oleh pihak si ayah biologis atau pengakuan yang dipaksakan oleh hukum melalui jalur pengadilan dengan melalui jalan pembuktian¹⁴.

⁷ Rossy Novita Khatulistiwa. *Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UUU Perkawinan: Implikasi terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal Universitas Brawijaya Tahun 2013.

⁸ Siska Lis Sulistiani. *Op. cit.* hlm. 94.

⁹ Ismail Suny. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Mimbar Hukum No.2 Tahun 1990. hlm.8.

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001. hlm.118.

¹¹ Ibid, hlm.117.

¹² Siska Lis Sulistiani. *Op.cit.* hlm.130.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani. *Op.cit.* hlm.108.

Hubungan nasab antara anak dengan ayah dalam Islam tidak ditentukan oleh sebab ilmiah, tetapi semata oleh sebab hukum artinya telah berlangsung hubungan akad nikah yang sah antara si ibu dengan si ayah yang menyebabkan anak itu lahir. Baik anak zina maupun anak *li'an* tidak mempunyai status hukum seperti ini. Oleh karena itu, ia hanya punya hubungan kewarisan dengan ibunya dan orang yang berhubungan nasab melalui ibunya dan tidak dengan ayahnya¹⁵. Dari aturan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin tersebut mencoba memberikan peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak keperdataannya sebagaimana status anak sah. Selama ini anak luar kawin mendapatkan kesulitan dalam mengakses apa yang menjadi haknya sebagai warga Negara maupun sebagai anak. Hanya saja, dalam tatanan hukum keluarga di Indonesia khususnya hukum perkawinan menggeneralisir istilah 'anak luar kawin' semua kategori anak yang dihasilkan oleh perkawinan yang tidak disahkan Negara walaupun perkawinan tersebut disahkan oleh agama contoh kasus perkawinan sirri. Ataupun yang disahkan Negara namun, tidak disahkan agama ini dapat disamakan dengan kasus nikah sirri. Dari hal-hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan terancamnya hak keperdataan seorang anak karena istilah anak luar kawin. Ataupun mengakibatkan kurangnya efek jera terhadap perbuatan zina sehingga menghasilkan anak zina. Karena pengkategorian istilah yang sama yaitu anak luar kawin bagi anak zina maupun anak sirri.

Maka dari hal tersebut, perlunya dikaji ulang mengenai istilah anak luar kawin dan pengkategorian dalam hukum keluarga Indonesia baik perspektif hukum positif maupun hukum Islam demi mewujudkan kepastian hukum, kesejahteraan anak dan mencegah perbuatan yang melanggar norma serta agama. Dari hal tersebut penulis meneliti terkait "Analisis Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Hukum Positif dan Hukum Islam".

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis taraf sinkronisasi hukum terkait anak luar kawin antara hukum positif dan hukum Islam, dengan jenis dan sumber hukum primer seperti KUHPerdara, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis. Sumber hukum sekunder seperti jurnal, tesis, disertasi, prosiding dan buku terkait materi yang dikaji. Sumber hukum tersier, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Semua data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka (*Library research*), kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

¹⁵ Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2002. hlm.144.

Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin atau yang dalam istilah hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak wajar) adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan¹⁶. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian anak luar kawin menurut Harun Utuh (1996) dipakai untuk dua pengertian, yaitu¹⁷:

1. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain yang sah (*overspel*) yang disebut dengan anak zina atau anak yang dilahirkan dari hasil hubungan pria wanita yang antara keduanya terdapat larangan kawin (*incest*), anak semacam ini dinamakan anak sumbang.
2. Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan seksual pria dan wanita yang masih sama-sama bujang dan tidak terdapat larangan kawin.

Letak perbedaannya adalah bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya¹⁸.

Menurut H. Herusuko yang dikutip Abdul Manan (2004)¹⁹, banyak faktor penyebab terjadinya anak di luar kawin, diantaranya adalah:

1. Anak yang dilahirkan seorang wanita, tetapi tidak terikat perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria dan wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita yang kelahirannya diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau kedua orang tuanya, hanya saja salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan yang lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi laki-laki yang menghamilinya tidak diketahui, misalnya akibat perkosaan.
4. Anak yang lahir dalam masa iddah perceraian, tetapi anak tersebut merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suami ibunya.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama mereka menentukan lain.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara yang melarang mengadakan perkawinan.
8. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.

¹⁶ Dirjen Bimas Depag. *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Depag RI, 2004.

¹⁷ Harun Utuh. *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

¹⁸ A Mannan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

¹⁹ *Ibid.*

9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, serta tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Anak Luar kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materil UU Perkawinan ini memunculkan berbagai implikasinya khususnya mengenai kedudukan anak luar kawin. Adapun kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdata Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian²⁰. Selain itu, menurut hukum Islam, Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah, sedangkan menurut hukum Adat, pada dasarnya Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya dan tidak mempunyai hubungan dengan ayah²¹.

Akan tetapi di Minahasa, anak luar kawin tetap mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi di sisi lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan²².

Dengan adanya terobosan hukum ini memberikan kesempatan kepada setiap anak luar kawin tanpa terkecuali untuk mengakses apa yang menjadi hak keperdataannya sebagai warga Negara baik jalur pembuktian di persidangan atau serangkaian pembuktian lainnya seperti melalui tes DNA atau yang lainnya. Hal tersebut, mengingat tidak berdosanya seorang anak yang lahir sehingga pada dasarnya tidak ada alasan bagi Negara dalam hal ini menjegal apa yang menjadi haknya sebagai warga Negara. Namun, di sisi lain tidak dapat dihindari berbagai polemik muncul dengan adanya putusan tersebut karena dalam pandangan

²⁰ Siska Lis Sulistiani. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

²¹ *Ibid.*

²² Rossy, N.K. *Uji materiil pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan: Implikasi terhadap sistem hukum keluarga di indonesia* (online). *Jurnal Universitas Brawijaya*. 2013.

norma dan hukum Islam khususnya untuk anak zina tidak dapat disamakan dengan anak luar kawin lainnya, hanya saja dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan pengkategorian anak luar kawin yang mana saja yang dimaksud, sehingga memunculkan pemahaman bahwa hal tersebut berlaku untuk semua anak luar kawin dalam kacamata hukum positif.

Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah sesuai agama yang dianut oleh kedua calon mempelai²³ atau tertib menurut hukum *syari'ah* (bagi yang beragama Islam) serta perkawinan tersebut juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁴. Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (*selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*)²⁵.

Selama ini masih terjadi ambiguitas dalam memaknai syarat materil dan formil perkawinan di Indonesia. Secara ideal, agar tujuan negara dalam mewujudkan tertib administrasi, pencatatan perkawinan seharusnya bukan hanya pada tataran administratif tetapi diintegrasikan menjadi syarat materil perkawinan. Perkawinan dianggap sah bukan hanya memenuhi syarat dan rukun seperti yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga yang dicatatkan pada instansi yang berwenang²⁶. Seperti di Mesir fatwa Syekhul Azhar bahwa *al-jiwaz al-'urf* adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengklasifikasikan ketentuan pernikahan kepada dua kategori, yaitu rukun *syar'iy* dan rukun yang bersifat *al-tawstiqi*²⁷.

Perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara secara otomatis berpengaruh pada status hukum anak dan istri nya pun menjadi sah. Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah

²³ R. Subekti. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa, 1990. hlm. 3.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2007. hlm.9.

²⁵ Anik Tri Haryani. *Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Judicial Review Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Sosial Vol.14 September 2013. hlm.13.

²⁶ Achmad Irwan Hamzani. *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*. Jurnal Konstitusi, Vol.12 No.1 Maret 2015. Hlm.62.

²⁷ Satria Effendi M.Zein. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontenporer*. Jakarta: Prenada Media, 2006. Hlm. 33-37.

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah²⁸:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu ikatan perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan masa kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Berbeda dengan status anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah atau pun hubungan yang tidak dibenarkan baik menurut agama maupun negara maka menjadikan anak tersebut ke dalam kategori anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya²⁹. Perbedaan anak zina dengan anak di luar nikah menurut hukum perdata adalah sebagai berikut³⁰:

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.
2. Apabila orang tua anak di luar nikah itu masih sama-sama bujang (jejaka, perawan, duda dan janda), mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak di luar nikah.

Dengan demikian, Islam memandang bahwa zina dengan segala bentuknya adalah merupakan tindak pidana umum yang disyariatkan untuk menjaga stabilitas masyarakat dan menghindari kemudharatan yang akan dialami anak-anak yang dilahirkannya³¹.

Menurut hukum Perdata Barat (BW), anak luar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan baik dengan wanita yang melahirkannya maupun dengan pria yang membenihkannya, kecuali kalau mereka mengakuinya³². Dengan demikian, secara terperinci ada 3 status hukum/kedudukan anak luar kawin, yaitu:

²⁸ Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2000. hlm. 30.

²⁹ J. Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. .hlm. 103.

³⁰ R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 16

³¹ Muhammad Aly Al-Shabuny. *Rawa'i al-Bayan bi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*. Bairut: Dar Ibnu 'Abbud, 2004. Hlm. 53.

³² Subekti, and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

1. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
3. Anak luar kawin menjadi anak sah, yakni anak luar kawin yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh perkawinan mereka.

Pada prinsipnya hukum perdata barat menganut asas pengakuan mutlak, dimana seorang anak luar kawin tidak akan memiliki hubungan perdata baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya tanpa adanya pengakuan dari mereka, dengan adanya prinsip tersebut mengakibatkan terjadinya sebuah kemungkinan bahwa secara yuridis seorang anak tidak memiliki ayah maupun ibu jika kedua orang tuanya tidak melakukan pengakuan terhadap nya. Prinsip seperti tersebut tidak diadopsi lagi oleh UU Perkawinan, dimana Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak di luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya³³. Begitu juga dalam Islam dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya³⁴, sebagaimana hadis Nabi saw berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنًا بَعْثَةً فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ قَطُّ. رواه البخارى ومسلم

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zum'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulallah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulallah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zum'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah

³³ D.Y Witanto, Hukum Keluarga Anak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.hlm.46.

³⁴ Yusuf Al-Qardhawi. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya : Citra Aditya Bakti, 1999. hlm.80.

(dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³⁵

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya³⁶."

Dengan demikian, anak luar kawin tersebut hanya mempunyai pertalian kekeluargaan dengan segala implikasinya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah yang memberihkannya.

Adapun pengakuan anak luar kawin berdasarkan Pasal 281 KUHPperdata dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu akta otentik, akta kelahiran, dan akta khusus yang berisikan pengakuan anak yang dibuat oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil³⁷.

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian anak tidak sah. Timbulnya istilah ini dalam pengertian hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogami secara mutlak yang dianut oleh KUHPperdata, di mana pada waktu yang sama seorang laki-laki atau perempuan hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki saja, dan jelas hal ini berbeda dengan hukum Islam yang menerima asas poligami.³⁸

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI, adalah: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang *dili'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepesusuan.

³⁵ Bukhari. *Shahih Bukhari*. Bairut : Darul Fikr, 1994. hlm. 154.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Eddo Febriansyah. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Nikah yang diakui dalam pembagian Waris*. Jurnal Hukum Unnes Vol.4 No.1 Tahun 2015. Hlm. 9 .

³⁸ Siska Lis Sulistiani. *Hukum Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016. Hlm. 115.

Angka 4 dan 5 di atas dalam hukum Islam disebut anak *syubhat* yang apabila diakui oleh Bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya³⁹.

Maka dari hal tersebut hal yang mencolok dalam kategori anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum agama saja, atau yang dikenal dengan perkawinan sirri, sehingga anak yang dihasilkan dalam perkawinan sirri dianggap anak luar kawin dalam hukum positif karena tidak ada hal yang dapat membuktikan (bukti otentik) seperti buku nikah terkait telah terjadi perkawinan sah antara ayah dan ibu anak tersebut. Sehingga dari kasus ini jika kembali melihat pada aturan yang berlaku, untuk dapat menetapkan pernikahan sirri tersebut dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga jika pernikahannya terisbatkan otomatis apa yang menjadi akibat hukum dari pernikahan tersebut termasuk anak dapat ditetapkan.

Selain itu, terkait aspek hak keperdataan anak luar kawin khususnya dalam mengakses dokumen keperdataan diantaranya akta kelahiran berdasarkan Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2007 menyatakan, terdapat tiga jenis akta kelahiran yang dikeluarkan dan ketiganya sah di mata hukum. Pertama, dalam akta tertulis nama anak, ibu dan ayahnya. Ini merupakan bayi yang lahir dari pernikahan resmi yang dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan kantor urusan agama (KUA). Kedua, dalam akta kelahiran hanya ditulis nama anak dan ibu saja, ketiga jika dalam akta kelahirannya itu, hanya tercantum nama anak saja, tanpa nama ibu dan nama ayahnya, yang berarti bayi itu ditemukan yang tidak jelas siapa nama ayah ibunya.

hal ini menjadi jalan tengah bagi anak luar kawin agar tetap dapat mengakses pendidikan yang didukung dengan dokumen-dokumen kependudukan yang sudah seharusnya didapat.

Kesimpulan

Anak merupakan amanah dari Allah SWT, baik anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun tidak sah di mata hukum, karena anak pada hakikatnya tidak dibebani dosa kedua orang tuanya, karena setiap bayi yang terlahir ke dunia adalah suci sesuai fitrahnya. Anak luar kawin dalam hukum positif di Indonesia adalah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah di mata agama dan di mata negara. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada istilah anak luar kawin secara definitif, hanya saja dalam hukum Islam ada yang disebut anak zina, yang secara hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia dinasabkan pada ibunya, adapun pada ayah biologisnya seharusnya wilayah pengadilan yang memberikan hukuman ta'zir untuk dapat bertanggung jawab menjamin kehidupan sang anak. Adapun putusan MK terkait anak luar kawin tidak bersifat mengikat, karena berbentuk yurisprudensi.

³⁹Abdul Halim Musthofa. *Implikasi Putusan MK terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah*. Jurnal Pemikiran Keislaman Vol.23 No.1 Januari 2012. hlm.7.

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. (2000). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Al-Jaziiri, Abdurrahman.(2008).*Al-Fiqh 'Alalmadzahib Al'arba'ah*.Bairut: Dar al-Kitab Al-'ilmiyah.
- Al-Shabuny, Muhammad Aly . (2004). *Rawa'i al-Bayan bi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*. Bairut: Dar Ibnu 'Abbud,
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1999). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya : Citra Aditya Bakti.
- Arifin,Busthanul.(1996). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Beni A &Syamsul F. (2012).*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV.PustakaSetia.
- Chaniago,AmranYs.(2002).*Kamus lengkap Bahasa Indonesia*.Bandung: PT. PustakaSetia.
- Darmadiharjo, Darji dan Shidarta. (1997). *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dirjen Bimas Depag. (2004). *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Depag RI.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2000). *Penghantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. (2003). *Aliran Hukum Kritis (paradigma ketidak Berdayaan Hukum)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV.MandarMaju.
- Hallaq, Wael B. (2005).*The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambrige: Cambridge University Press.
- Hukum Online.com. (2010). *Tanya JawabHukumWarisdanAnak*, Jakarta: Katelha.
- Madinah International University.(2011).*Fiqh Usroh*.Shah Alam: Jaami'ah Madinah al-'alamiyah.
- Madinah International University.(2011).*Thuruq Wa Wasaail Itsbat*. Shah Alam: Jaami'ah Madinah al-'alamiyah.
- Mahfud, Moh. MD.(2009).*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, Abdul.(2005).*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Salam,Izzudin Ibnu Abdis. (2011). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Nusa Media.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Adiya Bakti,
- Soemantri, Sri. (1997). *Hak Uji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Sulistiani, Siska Lis. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- _____ (2016). *Hukum Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Subekti, R. (1990). *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, and Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Syarifudin, Amir. (2002). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. (1986). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. (2000). *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Utuh, Harun. (1996). *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Usman, Suparman. (2002). *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Witanto, D.Y. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Yusdiansyah, Efik. (2010). *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Zein, Satria Effendi M. (2006). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media
- Zuhaili, Wahbah. (1984). *Al-Fiqhwa 'Adilatuh*. Damaskus: DarulFikr.
- Jurnal/Artikel :**
- Anwar, Syamsul dkk. (27Februari 2012). *Nasab Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-III/2010 Menurut Teori Fikih dan Perundang-Undangan*. Pengadilan Agama Majalengka.
- Febriansyah, Eddo. (2015). *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang Kedudukan Anak di luar Nikah yang diakui dalam pembagian Waris*. Jurnal Hukum Unnes Vol.4 No.1 Tahun 2015.
- Haryani, Anik Tri. (2013). *Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Judicial Review Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Sosial Vol.14 September 2013.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2015). *Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*. Jurnal Konstitusi, Vol.12 No.1 Maret 2015.
- Khatulistiwa, Rossy Novita. (2013). *Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UUU Perkawinan: Implikasi terhadap Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*. Jurnal Universitas Brawijaya Tahun 2013.

- Musthofa, Abdul Halim. (2012). *Implikasi Putusan MK terhadap Status Hukum Anak Luar Nikah*. Jurnal Pemikiran Keislaman Vol.23 No.1 Januari 2012.
- Nelli, Jumni. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. UIN Suska.
- Rosy, N.K. (2013). *Uji materiil pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan: Implikasi terhadap sistem hukum keluarga di indonesia* (online). Jurnal Universitas Brawijaya.
- Suny, Ismail. (1990). *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Mimbar Hukum No.2 Tahun 1990.